



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

ASN!
PILIH NETRAL

SISTEM MERIT DALAM ANGKA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Hampir satu dekade sistem merit telah menjadi prinsip dasar penyelenggaraan manajemen ASN, implementasinya di instansi pemerintah diwarnai dengan capaian yang beragam. Laporan info grafis "**SISTEM MERIT DALAM ANGKA TAHUN 2023**" ini menyajikan data dan informasi mengenai kondisi terkini penerapan sistem merit di instansi pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas KASN sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit. Format laporan disusun dalam bentuk info grafis agar gambaran kondisi penerapan sistem merit dapat dipahami dengan lebih mudah, baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan tugas KASN dan mendukung terselesainya penyusunan laporan ini. Kami berharap dukungan tersebut dapat terus ditingkatkan demi semakin terwujudnya meritokrasi di Indonesia.

Anggota KASN Koordinator Pengawasan
Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I

Sri Hadiati Wara Kustriani



DAFTAR ISI

TUGAS DAN FUNGSI KASN	4
DEFINISI DAN ASPEK SISTEM MERIT	5
PETA PERSEBARAN SISTEM MERIT	6
TOTAL POPULASI INSTANSI PEMERINTAH	7
TOTAL INSTANSI YANG SUDAH DINILAI	8-9
CAPAIAN TARGET RPJMN HINGGA 2023	10
INSTANSI YANG TELAH DISETUJUI MENGGUNAKAN TALENT POOL	11-12
LEMBAGA NON PRIORITAS NASIONAL DENGAN NILAI SM BAIK/SANGAT BAIK	13
TOP 10 NILAI SM TERTINGGI DI TIAP LEVEL INSTANSI PEMERINTAH	14-17
CAPAIAN PER ASPEK NILAI SISTEM MERIT	18
DATA PELANGGARAN SISTEM MERIT	19
PROGRAM INOVATIF KASN DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT	20-21
ANUGERAH MERITOKRASI 2023	22



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA



**Arie
Budhiman**



**Sri Hadiati
Wara Kustriani**



**Mustari
Irawan**



**Agus
Pramusinto**
Ketua



**Tasdik
Kinanto**
Wakil Ketua



**Agustinus
Fatem**



**Rudiarto
Sumarwono**

Komisi Aparatur Sipil Negara beranggotakan 7 orang komisioner yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.

TUGAS



Menjaga netralitas pegawai ASN



Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN



Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden

FUNGSI



Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN



Mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah

**Pasal 31 UU No.5 Tahun 2014*

4

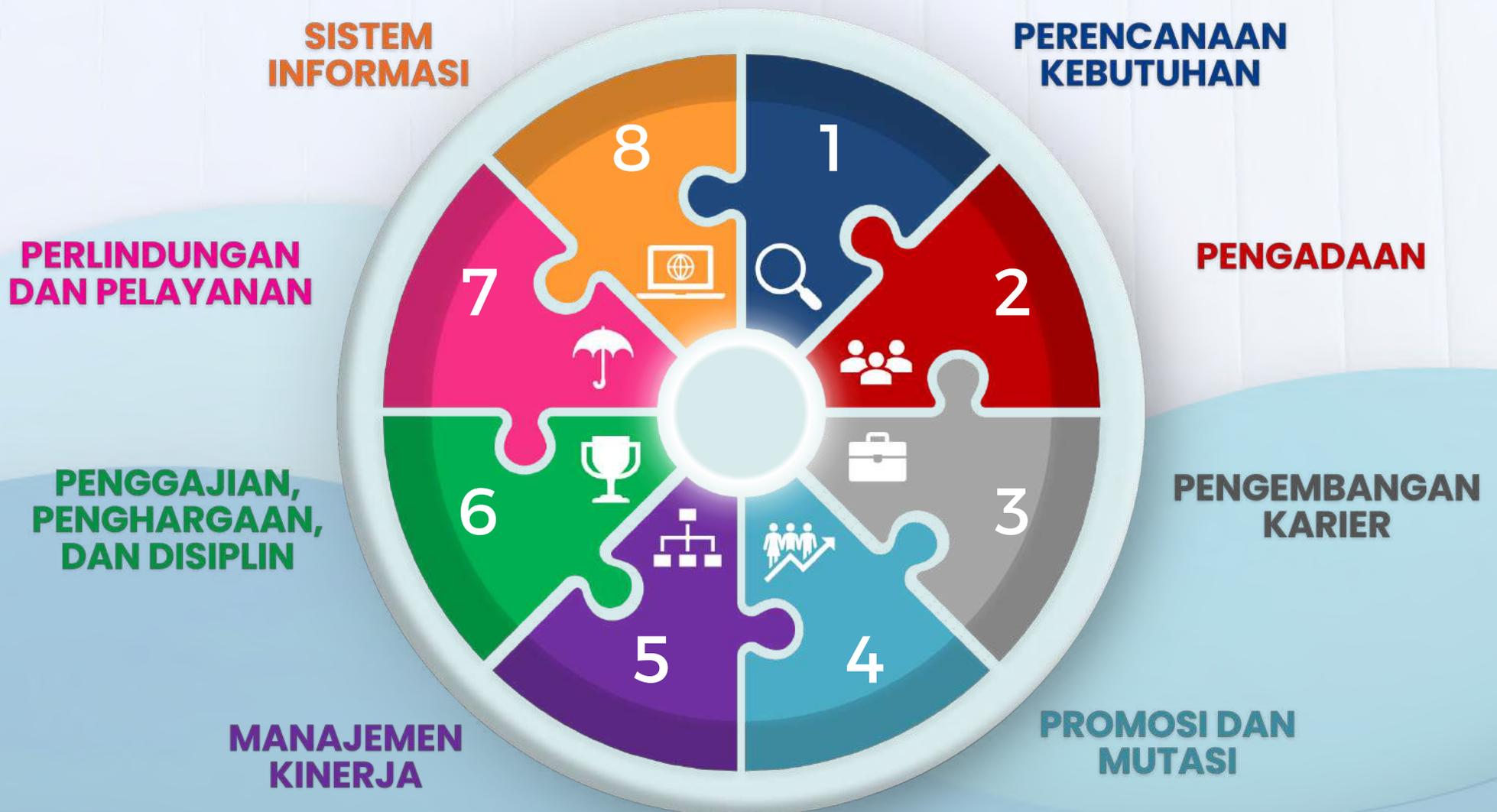
**SISTEM MERIT DALAM ANGKA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**



SISTEM MERIT

DALAM MANAJEMEN ASN

“ Dalam UU No. 5 tahun 2014 Sistem Merit didefinisikan sebagai "Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi." ”



Dalam **UU No. 20 tahun 2023**, "Prinsip Meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada **kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja**, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan **tidak membedakan latar belakang** suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus

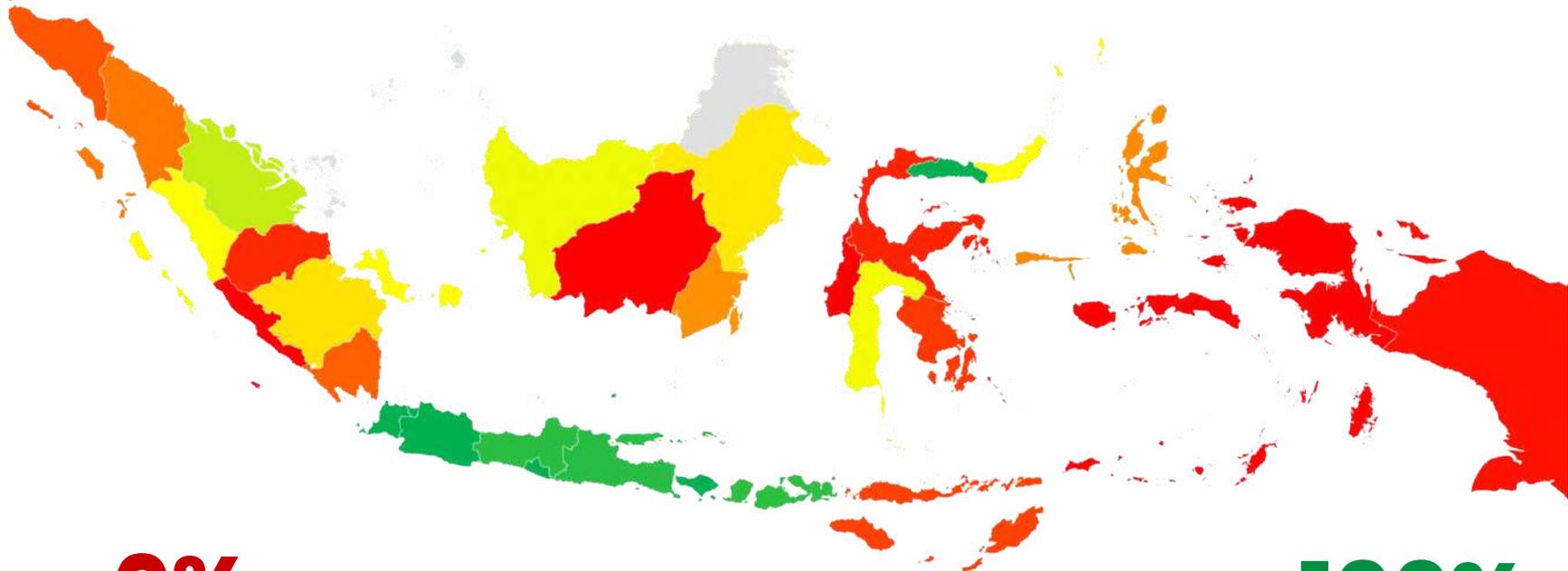
SISTEM MERIT DALAM ANGKA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

5





PETA PERSEBARAN SISTEM MERIT



0%



Data diambil dari persentase pemerintah daerah yang telah mendapatkan kategori penerapan sistem merit "Baik" dan "Sangat Baik" di setiap provinsi

100%



KATEGORI NILAI SISTEM MERIT

4

SANGAT BAIK
NILAI: 325-410
INDEKS: 0,81-1

3

BAIK
NILAI: 250-324
INDEKS: 0,61-0,8

2

KURANG
NILAI: 175-249
INDEKS: 0,41-0,6

1

BURUK
NILAI: 0-174
INDEKS: 0,2 - 0,4



TOTAL POPULASI INSTANSI PEMERINTAH OBJEK PENGAWASAN SISTEM MERIT KASN

MENGACU PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024

34

KEMENTERIAN

21

LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN

TOTAL

597

INSTANSI
PEMERINTAH

34

PEMERINTAH
PROVINSI

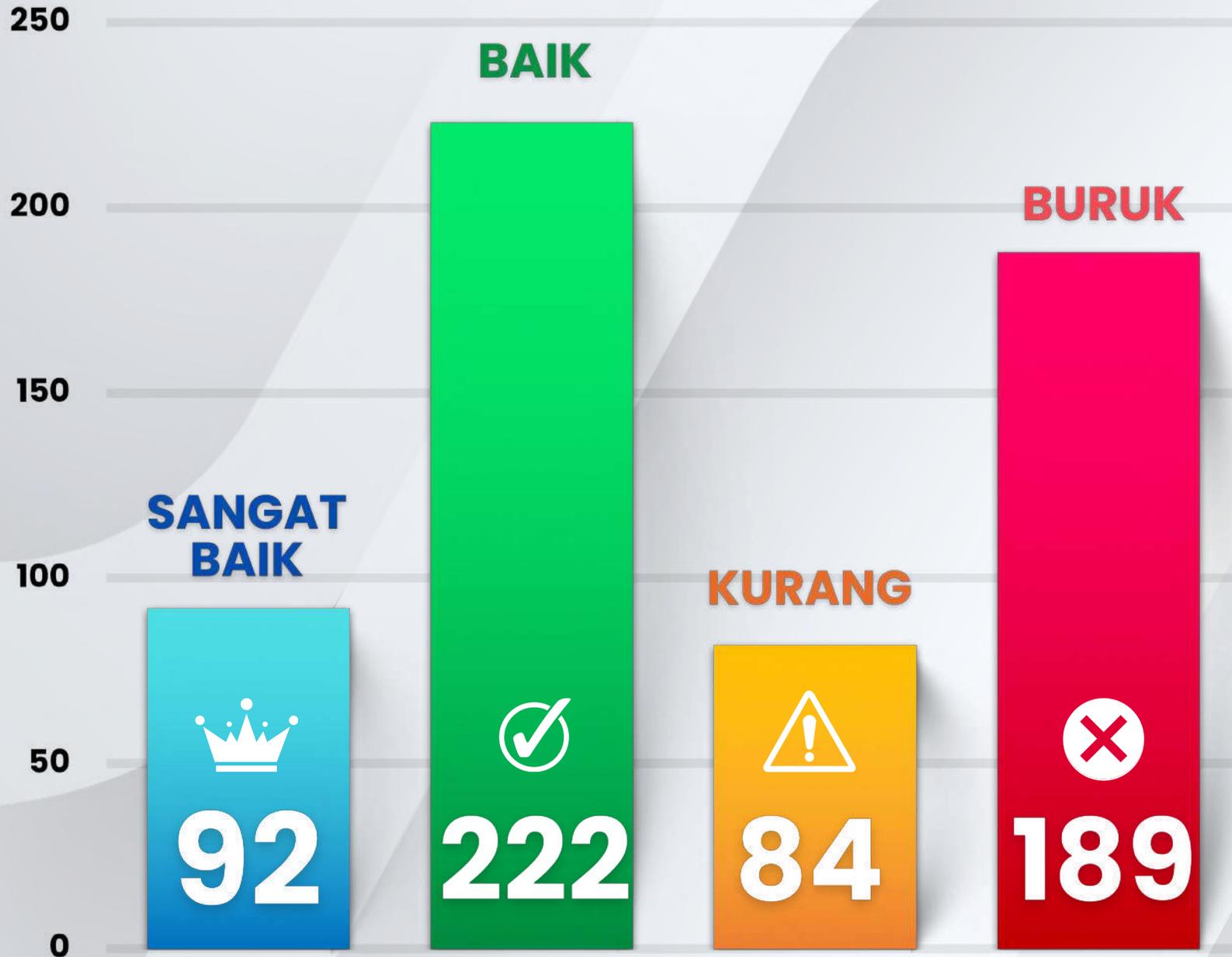
508

PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA



**TOTAL INSTANSI
PEMERINTAH YANG
SUDAH DINILAI**

587



**HINGGA AKHIR TAHUN 2023 TERDAPAT 587
INSTANSI YANG SUDAH DILAKUKAN PENILAIAN
PENERAPAN SISTEM MERIT OLEH KASN**



INSTANSI PEMERINTAH YANG SUDAH DINILAI HINGGA AKHIR TAHUN 2023

MENGACU PADA PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024



34 KEMENTERIAN 100%

21 LPNK 100%

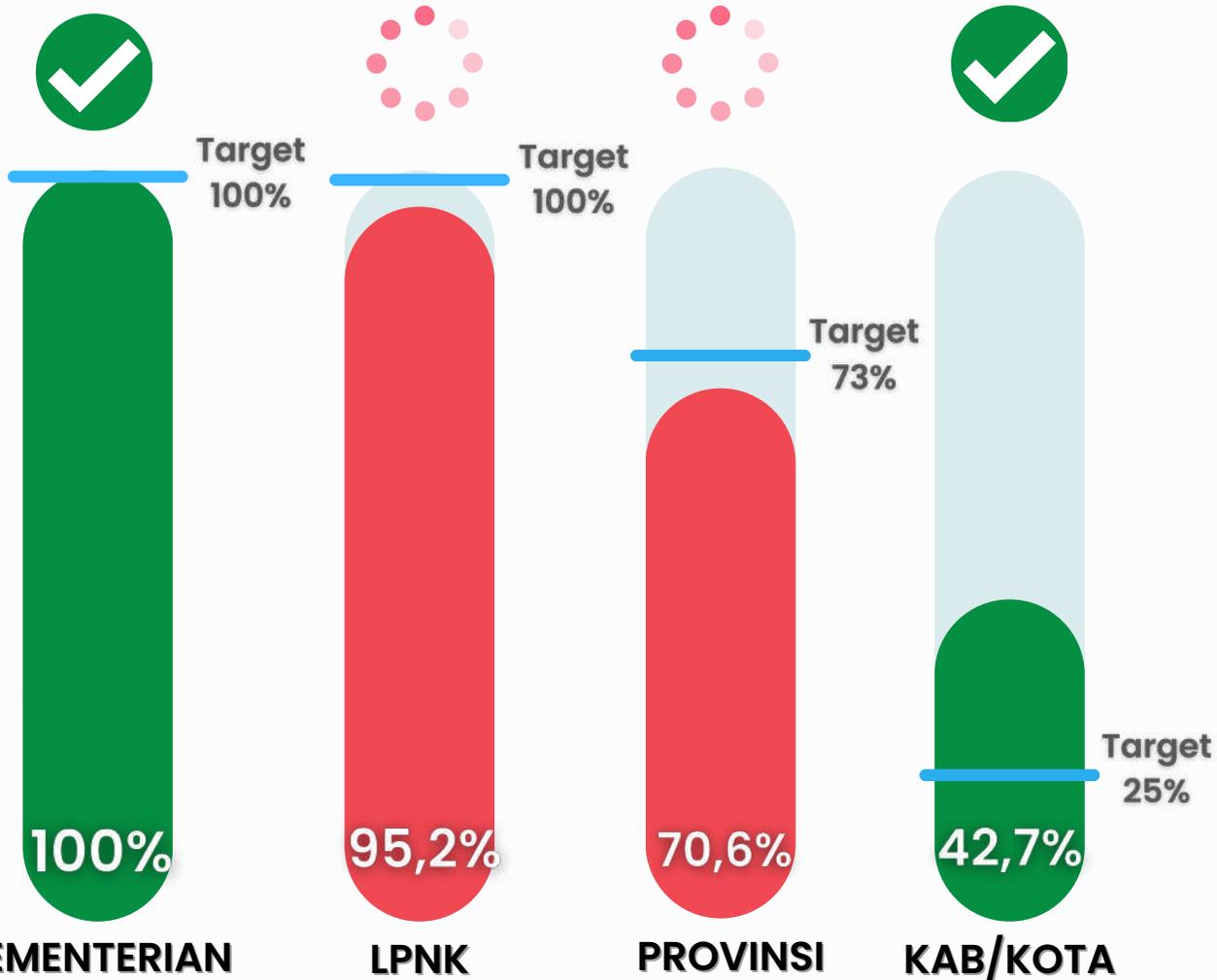
33 PROVINSI 97%

479 KAB/KOTA 94%

Dalam RPJMN 2020-2024, yang menjadi target prioritas nasional di level lembaga hanya LPNK. Akan tetapi, pada praktiknya **KASN juga sudah melakukan penilaian sistem merit untuk sejumlah LN dan LNS.**

CAPAIAN TARGET RPJMN TERKAIT KUALITAS PENERAPAN SISTEM MERIT HINGGA AKHIR 2023

MENGACU PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024

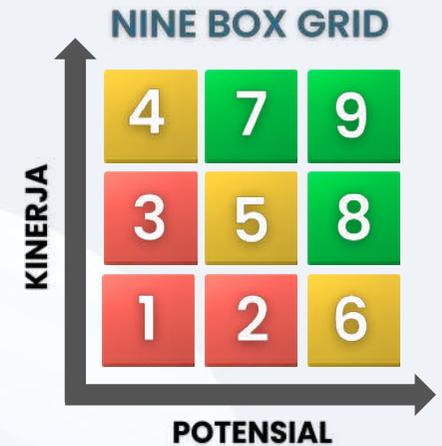




MANAJEMEN TALENTA ASN

Merupakan sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah.

PERMENPANRB NO.3 TH. 2020



314

TOTAL INSTANSI YANG SUDAH DITETAPKAN BAIK/SANGAT BAIK



13

INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH MELAKUKAN PENGISIAN JPT MELALUI MANAJEMEN TALENTA

22 INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH DISETUJUI UNTUK MENGGISI JPT MELALUI TALENT POOL



 KEMENTERIAN BUMN	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	 KEMENTERIAN KEUANGAN	 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	 MAHKAMAH KONSTITUSI	 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG	 PEMERINTAH KOTA TANGERANG	 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG		

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI	 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN	 PEMERINTAH KOTA BOGOR	 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN			

13 INSTANSI PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN PENGISIAN JPT MELALUI MEKANISME MANAJEMEN TALENTA

9 INSTANSI PEMERINTAH SIAP MELAKUKAN PENGISIAN JPT MELALUI MEKANISME MANAJEMEN TALENTA

18

LEMBAGA NON TARGET PRIORITAS NASIONAL DENGAN NILAI SISTEM MERIT BAIK/SANGAT BAIK



Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)

392,5
Sangat Baik



Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI)

342
Sangat Baik



Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI)

306,5
Baik



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

363
Sangat Baik



Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN)

335,5
Sangat Baik



Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP)

305,5
Baik



Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

361,5
Sangat Baik



Sekretariat Jenderal Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)

329
Sangat Baik



Sekretariat Jenderal Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM)

283,5
Baik



Badan Intelijen Negara (BIN)

355
Sangat Baik



Sekretariat Kabinet

366,5
Sangat Baik



Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

278
Baik



Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia (KY RI)

345
Sangat Baik



Kejaksaan Agung

329
Sangat Baik



Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia (RRI)

270
Baik



Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

342,5
Sangat Baik



Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)

329
Sangat Baik



Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia (TVRI)

255
Baik

10

NILAI SISTEM MERIT TERTINGGI DI TINGKAT KEMENTERIAN



Kementerian Kelautan dan Perikanan
393
Sangat Baik



Kementerian Badan Usaha Milik Negara
392,5
Sangat Baik



Kementerian Sekretariat Negara
390
Sangat Baik



Kementerian Keuangan
390
Sangat Baik



Kementerian Kesehatan
382,5
Sangat Baik



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
380,5
Sangat Baik



Kementerian Dalam Negeri
375
Sangat Baik



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
373,5
Sangat Baik



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
370
Sangat Baik



Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
366,5
Sangat Baik



10 NILAI SISTEM MERIT TERTINGGI DI TINGKAT LEMBAGA



Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)

387,5

Sangat Baik



Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI)

355

Sangat Baik



Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)

378

Sangat Baik



Badan Pusat Statistik (BPS)

341

Sangat Baik



Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)

372,5

Sangat Baik



Badan Kepegawaian Negara (BKN)

339

Sangat Baik



Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

372,5

Sangat Baik



Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

330,5

Sangat Baik



Lembaga Administrasi Negara (LAN)

372

Sangat Baik



Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (BASARNAS)

325

Sangat Baik

10

NILAI SISTEM MERIT TERTINGGI DI TINGKAT PROVINSI



Pemerintah Provinsi Jawa Barat
396,5
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
337,5
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Bali
386,5
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
335,5
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
353
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
333,5
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
349
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
332
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
340,5
Sangat Baik



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
331
Sangat Baik



10 NILAI SISTEM MERIT TERTINGGI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA



Pemerintah Kota Tangerang

366

Sangat Baik



Pemerintah Kota Bogor

344

Sangat Baik



Pemerintah Kota Bandung

359,5

Sangat Baik



Pemerintah Kota Surabaya

341,5

Sangat Baik



Pemerintah Kabupaten Tangerang

350,5

Sangat Baik



Pemerintah Kota Pekanbaru

338,5

Sangat Baik



Pemerintah Kabupaten Sijunjung

348

Sangat Baik



Pemerintah Kabupaten Bandung

338

Sangat Baik



Pemerintah Kabupaten Sumedang

344

Sangat Baik



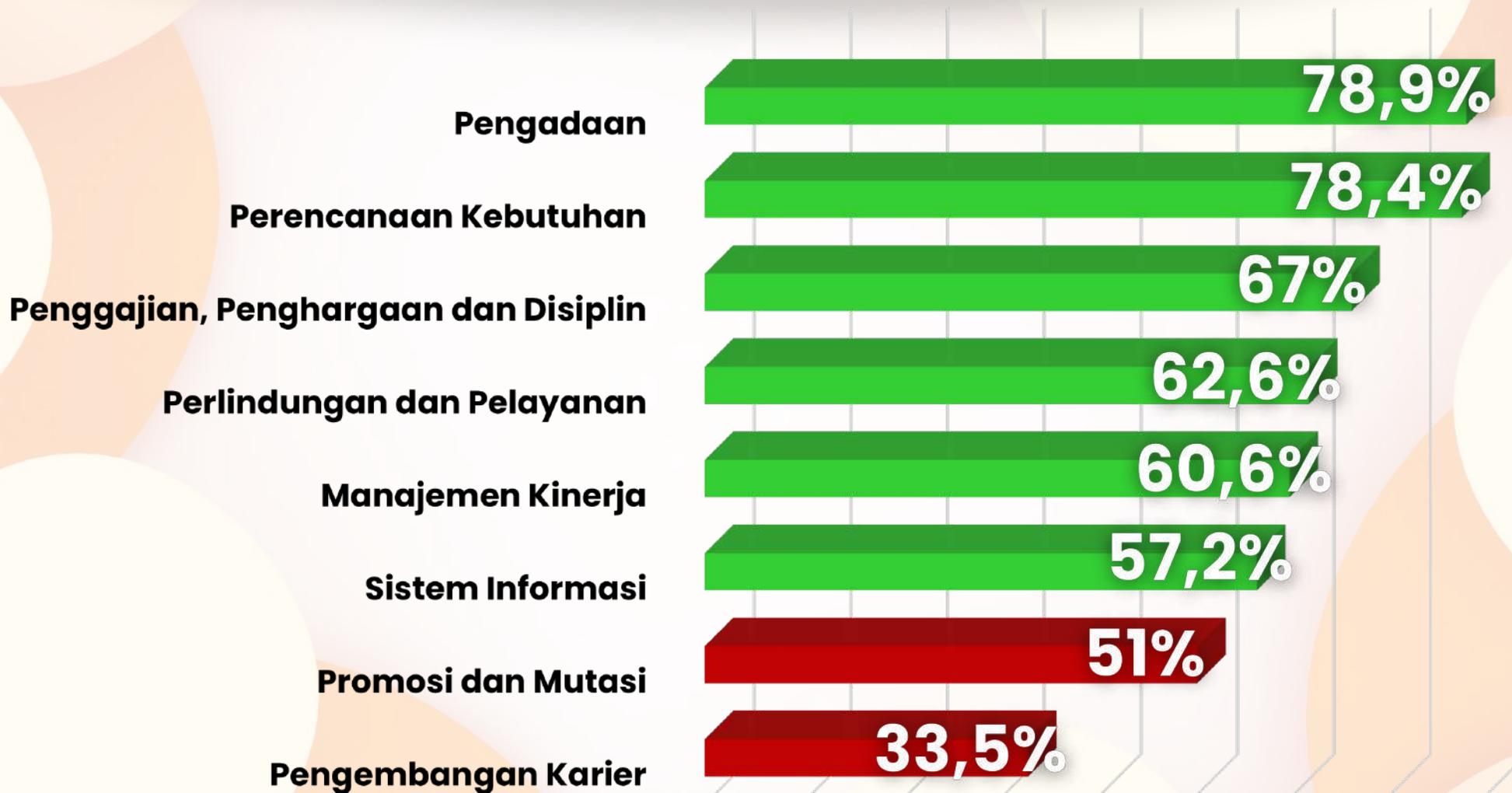
Pemerintah Kabupaten Wajo

338

Sangat Baik



CAPAIAN PER ASPEK PENILAIAN SISTEM MERIT DI INSTANSI PEMERINTAH



Aspek 'Pengembangan Karier' dan 'Promosi dan Mutasi' masih menjadi aspek yang memiliki tingkat ketercapaian terendah.



DATA PELANGGARAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN JABATAN JANUARI HINGGA NOVEMBER 2023





PROGRAM-PROGRAM INOVATIF SISTEM MERIT



**Community of Practice
Sistem Merit**
#ConnectingPractice

Community of Practice atau CoP Sistem Merit merupakan bentuk dari kolaborasi kerja yang dilakukan oleh KASN bersama dengan para praktisi manajemen ASN dalam rangka melakukan pembinaan penerapan sistem merit. Sejak tahun 2022 KASN telah menyelenggarakan :

15 Forum
(daring dan luring)

110 Kepada Lebih dari
Instansi
Pemerintah

KASN membentuk Laboratorium Sistem Merit (Lab SM) dengan berkolaborasi bersama instansi paguyuban SDM aparatur (Kementerian PANRB, BKN, dan LAN) untuk memberikan asistensi, pembinaan, dan pengawasan pada instansi lokus agar ke depannya dapat menjadi daerah percontohan yang berhasil menerapkan Sistem Merit. Lab SM telah berlangsung sejak akhir 2021.

3 Instansi
Pemerintah
sebagai Lokus

Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Nias
Kabupaten Manggarai Barat



**Laboratorium
Sistem Merit**

KNOWLEDGE MANAGEMENT



MERITOPEDIA

meritopedia.kasn.go.id



Meritopedia merupakan *platform* literasi informasi tentang sistem merit yang dikelola oleh KASN. Meritopedia diharapkan dapat mengakomodasi penyampaian literasi dan informasi kepada publik maupun Instansi Pemerintah.



Handbook Best Practice dan standar penyusunan bukti sistem merit dalam manajemen ASN ini disusun dari berbagai sumber, termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh KASN.

ANUGERAH MERITOKRASI 2023

3 KATEGORI 5 INSTANSI PEMERINTAH

1. Penghargaan Penerapan Sistem Merit
2. Penghargaan Kualitas Pengisian JPT
3. Penghargaan Tingkat Kepatuhan NKK

2 KATEGORI 63 INSTANSI PEMERINTAH

1. Penghargaan Penerapan Sistem Merit
2. Penghargaan Kualitas Pengisian JPT/
Penghargaan Tingkat Kepatuhan NKK

1 KATEGORI 62 INSTANSI PEMERINTAH

Penghargaan Penerapan Sistem Merit

MANAJEMEN TALENTA 13 INSTANSI PEMERINTAH

Penghargaan bagi instansi pemerintah yang telah melakukan pengisian JPT melalui mekanisme manajemen talenta



TIM PENYUSUN



Penanggung Jawab

Sri Hadiati Wara Kustriani

Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I



Pengarah

Mugi Syahriadi

Asisten KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I



Penyusun

Arif Rizal Maulana

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



Penyusun

Imelda Fatmawati

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



Penyusun

Martiyas Anggari Pamungkas

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

SISTEM MERIT DALAM ANGKA TAHUN 2023

Disusun oleh:
Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I
Komisi Aparatur Sipil Negara

ASN!
PILIH NETRAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

www.kasn.go.id



KomisiASNResmi



KASN_RI



Komisi_ASN



KASN RI

Scan untuk
mengunduh versi
digital
bit.ly/SMDA2023

